



Rp60 Miliar untuk Pilkada



KETAPANG - Pemerintah Kabupaten Ketapang mengelontorkan anggaran sebesar Rp60 miliar untuk mendanai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Dana tersebut akan dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ketapang. Penyerahan hibah tersebut

ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Kantor Bupati Ketapang, Jumat (10/11). Besaran hibah tersebut di antaranya untuk KPU sebesar Rp44 miliar. Dana tersebut sudah direalisasikan pada tahun 2023 sebesar 40 persen atau Rp17,6 miliar. Sedangkan sisanya akan diserahkan pada 2024.

Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo, mengatakan anggaran yang dialokasikan untuk Bawaslu Ketapang sebesar Rp16 miliar. Sebanyak Rp6,4 miliar sudah direalisasikan pada tahun ini. "Alokasi anggaran Pilkada itu adalah hasil dari verifikasi Pemerintah Kabupaten Ketapang. Kita kaji juga dari segi

PONTIANAK POST



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt **Nov** Des

2023

Hal.: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 **13** 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

kewajaran dan peraturan perundang-undangan. Kita tidak mau ada duplikasi anggaran. Kalau sudah dianggarkan Pemerintah Pusat, kita tidak boleh menganggarkannya kembali," kata Alex.

Menurutnya, penandatanganan NPHD Pilkada 2024 tersebut merupakan wujud dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Ketapang

agar penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dapat berjalan lancar tanpa kendala dari sisi keuangan.

"Dukungan anggaran ini agar KPU dan Bawaslu Ketapang dapat menjalankan tugas-tugas dengan baik tanpa ada kendala karena anggaran. Ini wujud kita mendukung penuh tugas-tugas KPU dan Bawaslu," tegas Alex. *(afi)*